Pemalsuan Surat Dalam Arti Formil Dan Materil Beserta Akibat Hukumnya

Abdul Rahim¹, Muhammad Ibnu Fajar Rahim²

¹ Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar

² Kejaksaan Republik Indonesia

Email Correspondensi : arahim@unismuh.ac.id

No. Handphone Correspondensi: (+6281354933669)

Artikel info

Artikel history:

Received: 01-08-2021

Revised: 02-09-2021

Accepted: 16-09-2021

Abstrak. Delik pemalsuan surat merupakan kejahatan yang klasik namun masih menghiasi statistik kejahatan di Indonesia. Realitasnya sebagai tindak pidana yang eksis, masih terdapat perbedaan penafsiran terhadap makna unsur dalam delik pemalsuan surat. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian bagi penegak hukum dalam menerapkan delik pemalsuan surat terhadap peristiwa hukum konkret. Sehingga diperlukan pemahaman yang jelas terhadap makna dan bentuk-bentuk delik pemalsuan surat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap bentuk pemalsuan surat dalam arti formil dan materil beserta akibat hukumnya, sehingga dapat membantu penegak hukum dalam menerapkan delik pemalsuan surat terhadap peristiwa hukum konkret.

Abstract. Letter forgery is a classic crime but still adorns crime statistics in Indonesia. As a criminal offense that still exists, there are still different interpretations in the meaning of the elements in the letter forgery crime. This creates uncertainty for law enforcers in applying the article of letter forgery crime against concrete legal events. Thus, a clear understanding and form of the letter forgery crimes regulated in the Criminal Code is required. This paper aims to provide an explanation of the form of letter forgery in a formal and material sense and its legal consequences, so that it can assist law enforcers in implementing the right letter forgery article against concrete legal events.

Keywords:

Pemalsuan Surat; Formil dan Materil; Akibat Hukum.

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai bagian dari hukum pidana materil mengatur perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau yang tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara.¹ Perbuatan yang dilarang tersebut seringkali disebut tindak pidana (*strafbar feit*) atau delik yang merupakan perbuatan yang memenuhi semua kompleksitas unsur-unsur yang dirumuskan dalam undang-undang.² Delik selalu dirumuskan dalam bentuk kalimat yang mengandung unsur-unsur baik unsur subyektif yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana maupun unsur obyektif yang berhubungan dengan perbuatan pidana. Unsur-unsur delik itulah yang membentuk pengertian hukum dari suatu delik tertentu.³ Dalam konteks penegakan hukum, penjelasan pengertian terhadap unsur-unsur delik dalam KUHP tersebut sangat diperlukan bagi penegak hukum untuk menerapkan hukum sesuai maksud dari pembuat undang-undang karena unsur-unsur dalam delik yang diatur dalam KUHP masih bersifat abstrak. Implikasi positif dari penerapan hukum berdasarkan penjelasan yang benar dan baik terhadap perbuatan yang dilarang dalam KUHP adalah terjaganya kewibawaan hukum di tengah-tengah masyarakat.

Salah satu delik yang diatur dalam KUHP adalah pemalsuan surat. Meskipun jarang tulisan yang membahas mengenai delik pemalsuan surat, namun delik pemalsuan surat merupakan salah satu delik klasik dan eksis diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP⁴ maupun undang-undang di luar KUHP.⁵ Tidak hanya itu, delik pemalsuan surat pun masih menghiiasi statistik kejahatan di Indonesia. Delik pemalsuan surat pasti selalu ada karena potensi keberadaannya absolut disebabkan sistem administrasi pemerintahan dan hubungan perjanjian di masyarakat yang membutuhkan dokumen-dokumen berupa surat. Eksistensi delik pemalsuan surat tersebut menjadikannya sebagai salah satu modus operandi paling favorit bagi mafia tanah untuk mengklaim hak kepemilikan tanah.⁶ Biasanya dilakukan dalam pembuatan perjanjian jual beli tanah. Para mafia tanah ini bekerjasama dengan oknum pemerintah desa untuk membuat surat-surat palsu yang mendasari kepemilikan tanah dan mencari seorang figuran yang akan bertindak seolah-olah sebagai pemilik tanah karena tanah tersebut telah ditinggal oleh pemilik yang sebenarnya. Setelah surat palsu yang menjelaskan kepemilikan tanah selesai dibuat, maka surat palsu tersebut kemudian digunakan sebagai dasar bagi figuran yang ditunjuk untuk menjual tanah kepada mafia tanah dengan sejumlah uang melalui akta jual beli. Alhasil akta jual beli yang didasari surat-surat palsu itu pun dijadikan hak untuk mengklaim status kepemilikan tanah bagi mafia tanah tersebut. Selain itu, saat ini berkembang jasa pembuatan

¹ Hiariej, Edward Omar Sharif, (2016). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi), Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, hal. 16.

² Chazawi, Adami dan Ferdian, Ardi, (2014). Tindak Pidana Pemalsuan : Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, hal. 1.

³ *Ibid.*

⁴ Dalam RUU KUHP tanggal 28 Agustus 2019 diatur dalam Bab XIII Tindak Pidana Pemalsuan Surat Pasal 397-406.

⁵ Pemalsuan surat diatur dalam UU ITE, UU Tipikor, UU Mata Uang, UU Pemilu, dsb.

⁶ Petunjuk Teknis Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria Pemanfaatan Ruang dan Tanah Nomor : 01/JUKNIS/D.VII/2018 tanggal 10 April 2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah.

surat palsu yang laris manis dicari oleh masyarakat. Mulai dari jasa pembuatan ijazah, kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi sampai dengan pembuatan surat sakit palsu. Begitupun pemalsuan surat dalam dunia maya atau yang menggunakan sarana elektronik. Memperhatikan eksistensi delik pemalsuan surat tersebut, maka pemahaman terhadap delik pemalsuan surat sangat penting bagi penegak hukum agar dapat menerapkan materi pasal yang mengatur delik pemalsuan surat dengan baik. Realitasnya, penjelasan terhadap delik pemalsuan surat masih dimaknai berbeda-beda oleh para penegak hukum. Hal tersebut berpotensi mengakibatkan penerapan hukum tindak pidana pemalsuan surat menjadi kurang efektif bahkan terkesan jauh dari makna sesungguhnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tulisan ini mencoba untuk menjelaskan bagaimanakah bentuk pemalsuan surat beserta akibat hukumnya. Kajian delik pemalsuan surat dalam tulisan ini dibatasi pada analisis terhadap delik yang dirumuskan dalam Pasal 263 ayat (1) KUH.Pidana dan Pasal 264 ayat (1) KUH.Pidana.

METODE

Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual terhadap bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan kemudian dianalisis menggunakan metode penafsiran gramatikal, sistematis, serta ekstensif.

PEMBAHASAN

A. Sejarah Pengaturan Delik Pemalsuan Surat

Melihat dalam konteks sejarahnya, ketentuan delik pemalsuan surat dalam KUHP tidak bisa dilepaskan dari ketentuan hukum pidana yang berlaku di Belanda yang juga terpengaruh dari ketentuan *Code Penal* dalam Hukum Romawi dan Hukum Prancis.⁷ *Code Penal* Hukum Romawi mengatur bahwa suatu *de eigenlijke falsum* atau delik pemalsuan meliputi pemalsuan surat-surat berharga dan pemalsuan mata uang.⁸ Baru kemudian ditambah dengan delik pemalsuan lainnya yang sifatnya menipu namun sesungguhnya delik tersebut berbeda dengan pemalsuan terhadap surat. Di dalam doktrin delik pemalsuan lainnya tersebut disebut sebagai *quasi falsum* atau pemalsuan yang sifatnya semu.⁹ Sejak saat itulah, para ahli hukum tidak pernah membedakan secara tegas antara *de eigenlijke falsum* sebagai delik pemalsuan surat dengan *quasi falsum* sebagai delik pemalsuan yang sifatnya semu. Hal tersebut secara berlanjut diterapkan oleh para pembentuk *Code Penal* di Prancis dengan menyebut delik pemalsuan sebagai *faux en ecritures*. *Code Penal* dalam Hukum Prancis menempatkan *faux en ecritures* bersama-sama dengan tindak pidana lainnya yang sebenarnya bukan merupakan delik pemalsuan surat yang disebut sebagai *les crimes et delits contre la paix publique* atau delik terhadap ketertiban umum.¹⁰ Dalam KUHP Indonesia saat ini maupun dalam RUU KUHP tanggal 28

⁷ Simons, *Leerboek van het Nederlandse Straftrecht II*, hlm. 336, sebagaimana dikutip oleh Lamintang, P.A.F. (2009). *Delik-delik Khusus : Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat-Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan. Cet.1.*, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 1.

⁸ Zulfa, Eva Acjani. (2018). Menghancurkan Kepalsuan (Studi Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Dan Problema Penerapannya. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, No. 2, 345-360, <<http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1667>>.

⁹ Van Bemmelen dan Van Hattum, *Hand en Leerboek van het Nederlandse-Straftrecht II*, hlm. 398 sebagaimana dikutip Lamintang, *Op.Cit.* hal. 2.

¹⁰ *Ibid.*

Agustus 2020, ketentuan delik pemalsuan surat dirumuskan dalam Buku II KUHP tentang kejahatan dan bab tersendiri tentang pemalsuan surat. Pengaturan yang berbeda dengan KUHP dan RUU KUHP, namun memiliki kesamaan dengan *Code Penal* Hukum Prancis, dalam Pasal 6 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum (PERJA 36/2011), menempatkan delik pemalsuan surat sebagai bagian dari delik terhadap keamanan negara dan ketertiban umum. Konsekuensi dari pengaturan dalam PERJA 36/2011 tersebut menjadikan delik pemalsuan surat sebagai delik biasa yang dapat di proses hukum tanpa adanya pengaduan karena sifatnya yang mengganggu keamanan negara dan ketertiban umum.

Cleiren dan Nijboer menegaskan bahwa ada 2 (dua) kepentingan yang dilindungi dalam delik pemalsuan surat, yaitu : 1) kepentingan umum (*publica fides*); dan 2) dapat menimbulkan kerugian.¹¹ Surat sebagai salah satu pranata untuk melakukan hubungan hukum privat baik itu perjanjian, waris, maupun hubungan publik harus dijaga kepercayaan dan kebenarannya. Masyarakat, negara, dan pemerintah menaruh suatu kepercayaan atas kebenaran dari apa yang dituangkan dalam suatu surat baik surat biasa terlebih lagi akta otentik. Terdapat kepercayaan dan kebenaran dari isi surat tersebut harus dijamin, karena ada kepentingan hukum yang dilindungi didalamnya sehingga. Dengan dasar itulah, delik pemalsuan surat dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum tersebut. Penyerangan terhadap kepercayaan masyarakat atas kebenaran isi surat adalah berupa perbuatan yang dapat dipidana, yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu kejahatan, yakni delik pemalsuan surat. Pemalsuan terhadap surat yang berkaitan dengan hak privat maupun berkaitan dengan kepentingan publik merupakan bentuk kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban umum.

B. Unsur-Unsur Delik Pemalsuan Surat Dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Pasal 264 ayat (1) KUHP

Delik pemalsuan surat diatur dalam Bab XII tentang Pemalsuan Surat Pasal 263-278 KUHP. Dari pasal-pasal yang mengatur delik pemalsuan tersebut, definisi pemalsuan surat termuat secara normatif dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP yang menyebutkan pemalsuan surat adalah perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.¹² Berbeda dengan delik pemalsuan surat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP yang merupakan delik pemalsuan terhadap surat biasa, ketentuan Pasal 264 ayat (1) KUHP merupakan delik pemalsuan yang diperberat karena dilakukan terhadap : 1) akta-akta otentik; 2) surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum; 3) surat sero atau hutang sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai; 4) talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang

¹¹ C.P.M. Cleiren, dan Red. J.F. Nijboer, (1997). *Het Wetboek van Strafrecht, Teks en Commentaar*. Deventer : Kluwer, hlm. 273., sebagaimana dikutip oleh Hamzah, Andi, (2017). *Delik Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP (Edisi Kedua)*, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 129.

¹² *Ibid.*

diterakan dalam angka 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu; 5) surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.¹³ Pemberatan tersebut diwujudkan dalam bentuk sanksi pidana dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP lebih berat, yakni pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dibandingkan Pasal 263 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. Pasal 264 ayat (1) KUHP merupakan delik terkualifisir dari Pasal 263 ayat (1) KUHP, karena pemalsuan surat dilakukan terhadap akta otentik sebagai unsur pemberat.

Mencermati rumusan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP, maka dapat diketahui unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1) Unsur objektif :
 - a) Perbuatannya : membuat palsu atau memalsukan.
 - b) Objeknya : surat yang dapat menimbulkan suatu hak, surat yang menimbulkan suatu perikatan, surat yang menimbulkan suatu pembebasan hutang, atau surat yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal.
 - c) Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.
- 2) Unsur Subjektif : dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.¹⁴

Sedangkan dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP memiliki unsur objektif dan subjektif yang hampir sama dengan unsur-unsur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, namun karena merupakan delik terkualifisir, maka objek delik pemalsuan surat dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP adalah surat-surat yang ditentukan dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP itu sendiri yang salah satunya adalah akta otentik.

Unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP adalah *Pertama*, unsur barang siapa, yaitu subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang dituju oleh suatu rumusan tindak pidana atau yang menjadi *addresat* dari suatu ketentuan undang-undang tentang suatu tindak pidana.¹⁵ Dalam hal ini, Pasal 263 ayat (1) KUHP tidak mensyaratkan kualitas tertentu dari pelaku untuk dapat melakukan tindak pidana ini, sehingga dapat meliputi siapa saja. *Kedua*, unsur membuat surat palsu atau memalsu surat, yaitu menuangkan pikiran secara tertulis dalam hal mana apa yang ditulis tersebut merupakan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran atau meniru suatu surat yang telah terlebih dahulu ada seolah-olah merupakan surat asli.¹⁶ *Ketiga*, unsur dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal, yaitu surat tersebut menimbulkan akibat tertentu berupa adanya hak dari seseorang baik pelaku sendiri atau orang lain, ataupun menimbulkan perikatakan antara orang-orang tertentu baik pelaku sendiri dengan orang lain atau orang lain dengan orang lain ataupun menimbulkan hapusnya hutang, baik hutang pelaku sendiri atau orang lain ataupun surat yang dibuat sebagai bukti atas suatu hal. Ini merupakan

¹³ *Ibid.*, hal. 129.

¹⁴ Chazawi, Adami dan Ferdian, Ardi, *Op.Cit.*, hal. 137.

¹⁵ Assa, Efrita Amalia. (2021). Tindak Pidana Pemalsuan Uang Oleh Korporasi Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. *Lex Crimen*, 10(3).

¹⁶ Susanto, Eko Adi, & Gunarto. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Yang Memakai Surat Palsu Ditinjau Dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1). <<http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2558>>.

unsur objektif, yang mana sifat dari surat tersebut dapat menimbulkan sesuatu yang bermanfaat bagi yang membuat, menerima ataupun menggunakan surat tersebut.¹⁷ *Keempat*, unsur dengan maksud, yaitu unsur ini menandakan bahwa bentuk kesalahan dalam pasal ini adalah kesengajaan. Artinya, si pelaku ketika melakukan perbuatan, ia mengetahui dan menghendaki (*weten en willens*), baik perbuatan maupun akibat dari perbuatan tersebut.¹⁸ Sama dengan unsur dengan tujuan, yang menggambarkan bahwa pembentuk undang-undang menghendaki bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat) atau yang disebut juga dengan *dolus directus*. Jadi kesengajaan si pelaku tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya, melainkan juga kepada akibat perbuatannya.¹⁹ *Kelima*, unsur untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakainya, yaitu pembuatan surat tersebut disengaja pelaku untuk dipakainya sendiri atau menyuruh orang lain memakainya. yang berarti bahwa pelaku sengaja menggunakan surat isinya tidak benar atau telah dipalsu, dan mengenai ketidakbenaran atau kepalsuan dari surat tersebut telah diketahui oleh pelaku, namun pelaku tetap sengaja menggunakannya seolah-olah surat tersebut benar dan tidak palsu isinya, atau dapat dikatakan ini merupakan delik pemalsuan secara materiil.²⁰ *Keenam*, unsur jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, yaitu termasuk adanya kemungkinan (potensi) kerugian, baik kerugian materiil ataupun finansial bagi pihak lain selain pelaku apabila surat tersebut digunakan.²¹ Mengapa harus kerugian materiil? Hal ini dikarenakan adanya unsur sebelumnya, bahwa surat yang dipalsu tersebut haruslah surat yang menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal, maka telah menunjukkan dengan jelas bahwa kerugian yang harus terjadi dalam adalah kerugian yang bersifat materiil/finansial/atau memiliki nilai ekonomis.

Selanjutnya unsur-unsur yang dimaksud dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP. Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya objek pemalsuan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP adalah surat biasa sedangkan pada Pasal 264 ayat (1) KUHP adalah akta otentik, surat hutang bagian negara, surat hutang dari lembaga umum, surat sero, dan talon. Namun, pada tulisan ini membatasi pada akta otentik. Dari sudut pejabat pembuatnya, akta otentik dibagi menjadi 2 (dua), yakni akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) dan akta otentik yang dibuat oleh pejabat lain atau pegawai-pegawai umum (*ambtenaren of personen*) yang bukan pejabat umum (*ambtenaren of personen*). Pertama, akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum (*openbaar ambtenaar*). Akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum

¹⁷ Lamatenggo, Christellia G.N. (2021). Kajian Yuridis Pemalsuan Surat Sederhana (Pasal 263 KUHP) Dalam Kaitannya Dengan Pemalsuan Akta Otentik (Pasal 264 Ayat (1) Ke 1 KUHP). *Lex Crimen*, 10(1), 70-78.

¹⁸ Rays, Moh. Ikhwan. (2017). Tinjauan Hukum Delik Pembunuhan, Delik Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dan Delik Kealpaan Menyebabkan Kematian. *Jurnal Yustisiabel*, 1(1), 83-99, <<https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v1i1.406>>.

¹⁹ Gultom, Lidya., Kalo, Syafrudin., Mulyadi, Mahmud., & Ekaputra, M. (2021). Criminal Liability Against Children As Offenders Of Narcotics Abuse Based On The Decision Of The Tebing Tinggi District Court No. 21/Pid. Sus-Anak/2018/PN. TBT. *Res Nullius Law Journal*, 3(1), 55-78, <<https://doi.org/10.34010/rnlj.v3i1.3709>>.

²⁰ Aryana, I Wayan Putu Sucana. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Keterangan Negatif Covid-19. *Jurnal Yustitia*, 14(1), 34-40.

²¹ Kaligis, Geovan Valentino. (2021). Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Pasal 263 KUHP. *Lex Privatum*, 9(4), 175-182.

inilah yang dimaksud akta autentik dalam Pasal 1868 KUH.Perdata, yang menyatakan bahwa akta autentik adalah akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum (*openbaar ambtenaar*) yang berkuasa untuk itu di tempat mana akta itu dibuatnya.²² Contohnya akta-akta yang dibuat oleh notaris atau akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS). Dalam Pasal 1 UU RI No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Kedua, akta autentik yang dibuat oleh pejabat lain atau pegawai-pegawai umum (*ambtenaren of personen*), yang bukan pejabat umum (*openbaar ambtenaar*). Contohnya, pejabat pencatat nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) atau pencatat nikah di Kantor Catatan Sipil, Panitera Pengadilan, Jurusita, termasuk Penyidik yang membuat Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Hakim yang membuat putusan atau penetapan.²³ Dari penjelasan akta otentik tersebut, maka penentuan otentiknya suatu surat didasarkan pembuatan surat tersebut dilakukan oleh pejabat yang sah. Pembuatan surat tersebut mencakup dibuat dihadapan pejabat yang sah, misalnya akta jual beli maupun akta notaris, maupun ditandatangani oleh pejabat sah.

Terdapat pembatasan mengenai surat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Pasal 264 ayat (1) KUHP, sedangkan unsur subjektif maupun objek perbuatannya tetap sama, yakni membuat palsu atau memalsukan. Begitupun dalam pasal-pasal lainnya yang mengatur delik pemalsuan surat dalam KUHP, maka objek delik pemalsuan surat adalah surat itu sendiri, baik itu surat biasa maupun surat otentik, sedangkan objek perbuatan yang dilarang adalah membuat palsu atau memalsukan. Inilah yang menjadi fokus analisis dalam tulisan ini.

C. Membuat Palsu dan Memalsukan Surat Dalam Arti Materil Dan Formil Beserta Akibat Hukumnya

Dalam memaknai hakikat perbuatan membuat palsu atau memalsukan surat sebagai objek perbuatan yang dilarang dalam Pasal 263 ayat (1) KUH.Pidana dan Pasal 264 ayat (1) KUH.Pidana, maka terdapat 5 (lima) hal yang harus dipahami sebagai berikut :

1) Makna Membuat Palsu Atau Memalsukan Surat

Keduanya kedengaran serupa tapi tidak sama. Dalam perbuatan membuat surat palsu, tidak perlu bukti pembanding dari surat-surat palsu tersebut. Misalnya, saya tidak pernah sekolah di FKIP Universitas Muhammadiyah, tetapi saya punya ijazah FKIP Universitas Muhammadiyah. Ini namanya membuat palsu. Kalau dicari pembanding, sampai mati tidak pernah akan ada. Karena saya tidak pernah kuliah di FKIP Universitas Muhammadiyah, tapi saya mempunyai ijazah FKIP Universitas Muhammadiyah. Ini namanya membuat palsu, jadi tidak ada pembandingnya. Akan tetapi, apabila memalsukan surat, maka harus ada bukti pembanding. Harus ada surat yang

²² Hendra, Rahmad. (2012). Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Menggunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1). <<http://dx.doi.org/10.30652/jih.v3i01.1029>>.

²³ Chazawi, Adami dan Ferdian, Ardi. *Op.Cit.*, hal. 165-166.

orisinil untuk membedakan mana kemudian yang asli dan yang palsu. Namun, dalam praktiknya, apabila bukti pembandingan tersebut tidak dapat ditemukan, maka cukup dibuktikan melalui alat-alat yang digunakan oleh pelaku dalam memalsukan surat. Oleh karenanya, dalam konteks Pasal 263 ayat (1) KUH.Pidana dan Pasal 264 ayat (1) KUH.Pidana menggunakan istilah membuat surat palsu atau memalsukan surat sebagai objek perbuatan yang dilarang. Hal tersebut bertujuan memberi kemudahan kepada penuntut umum sebagai pejabat yang dikenai kewajiban untuk membuktikan²⁴ maupun menerapkan unsur Pasal 263 ayat (1) KUH.Pidana dan Pasal 264 ayat (1) KUH.Pidana terhadap peristiwa hukum konkret apakah konteksnya membuat surat palsu atau memalsukan surat palsu.

2) Pemalsuan Dalam Arti Materiil Dan Ada Pemalsuan Dalam Arti Formil

Apabila melihat objek yang dipalsukan, maka delik pemalsuan surat pun dapat dibedakan menjadi 2 (dua) arti, yakni dalam arti materiil dan formil. Pertama, pemalsuan dalam arti materiil berarti apa yang dinyatakan dalam suatu surat itu tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Membuat surat secara tidak benar. Tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya yang bisa memutar balikkan fakta. Tetapi bisa juga tidak mencatumkan apa yang seharusnya dicantumkan dalam suatu surat. Sekali lagi, yang namanya pemalsuan surat secara materiil itu apa yang dinyatakan dalam suatu surat, secara faktual berbeda. Contohnya, yang berbeda adalah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya atau tidak memasukkan yang seharusnya dimasukkan. Misalnya dalam membuat surat keterangan waris saya menyatakan bahwa anak dari a dan d adalah x dan y, padahal ada z yang saya tidak masukkan, padahal z ini seharusnya dimasukkan, ini masuk dalam kategori pemalsuan surat secara materiil, yakni tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Ataukah dalam hal lain misalnya, pada surat keterangan waris dimana ahli waris adalah a, b, c, namun yang tertulis adalah d, e, f, yang dengan demikian tidak sesuai dengan fakta, ini juga termasuk dalam pemalsuan surat dalam arti materiil, yakni menerangkan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya atau keterangannya tidak lengkap di dalam suatu surat.

Kedua adalah pemalsuan surat dalam arti formil, yakni berkaitan dengan kelengkapan formil dalam suatu surat seperti kop surat, tanggal, stempel, dan tandatangan. Meskipun isi surat sesuai dengan fakta yang sebenarnya, namun misalnya kop surat, tandatangan dipalsukan ataukah orang seharusnya bertandatangan disitu tetapi kenyataan yang bertandatangan adalah orang lain, tapi isinya sesuai dengan fakta, yang dengan demikian termasuk pemalsuan surat dalam arti formil. Konsekuensi dari sebuah tanda tangan dalam suatu surat baik surat biasa maupun akta otentik adalah suatu pernyataan sudah barang tentu diakui oleh atau dipertanggungjawabkan pada orang yang menandatangani surat tersebut. Dalam arti, orang yang bertandatangan bertanggungjawab terhadap keseluruhan isi dari surat tersebut atau dalam hal kapasitasnya bertandatangan. Misalnya si a bertandatangan dalam akta jual beli yang hanya menyaksikan proses jual beli benar terjadi, maka si a hanya dipertanggungjawabkan terhadap kebenaran proses jual beli yang terjadi. Namun, misalnya si b selaku kepala desa yang

²⁴ Rahim, Muh. Ibnu Fajar, et.l. (2020). Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana pada Tingkat Pemeriksaan Persidangan. *Pleno Jure*, 9(1), 47-57. <<https://doi.org/10.37541/plenojure.v9i1.389>>.

bertandatangan dalam akta jual beli, maka dirinya bertanggungjawab terhadap isi akta jual beli tersebut beserta surat-surat keterangan desa yang menjadi lampiran akta jual beli tersebut. Begitupun, pejabat pembuat akta tanah, bertanggungjawab dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang mempertemukan antara penjual dan pembeli beserta proses jual beli antara keduanya. Jadi, barang siapa yang bertandatangan dalam suatu surat, maka terhadap dirinya dapat dikenai pertanggungjawaban dalam kapasitasnya sebagai orang yang bertandatangan.

Baik pemalsuan dalam arti materil dan formil ini merupakan bentuk pemalsuan yang ada dalam perbuatan membuat surat palsu dan memalsukan surat, sehingga penuntut umum dan hakim pun harus mampu membedakan dan membuktikan bentuk pemalsuan surat yang terjadi.

3) Akibat Hukum Pemalsuan Surat Dalam Arti Formil Dan Materil

Sehubungan dengan kewajiban untuk membuktikan bentuk pemalsuan surat yang terjadi atau dilakukan oleh pelaku, baik pemalsuan surat dalam arti formil dan materil memiliki akibat hukum yang berbeda. Pemalsuan surat dalam arti materil memiliki akibat hukum terhadap batalnya surat tersebut. Sedangkan, pada pemalsuan surat secara formil, disamping batalnya surat tersebut, dalam pemalsuan surat secara formil terhadap akta otentik dalam kondisi meskipun akta tersebut isinya benar, namun karena akta otentik tersebut ditandatangani oleh seorang pejabat yang tidak memiliki hak maupun kewajiban untuk bertandatangan, maka berakibat terhadap otentikasi akta tersebut menjadi hilang sehingga menjadi akta biasa. Suatu akta menjadi akta otentik dikarenakan dibuat oleh pejabat yang berwenang. Dalam konteks pembuktian, menjadi sangat penting ketika penuntut umum merumuskan dakwaan maupun membuktikan dakwaan, dimana meskipun surat yang dipalsukan adalah akta otentik namun oleh karena akta otentik dibuat atau ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang, sehingga menjadi akta biasa, maka dakwaan yang paling tepat atau dakwaan yang harus dibuktikan adalah pemalsuan terhadap akta biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP. Hal ini disebabkan, karena dari awal, akta yang dipalsukan tersebut merupakan akta biasa. Contohnya, akta otentik berupa akta jual beli yang seharusnya ditandatangani oleh seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS). Apabila akta jual beli tersebut dibuat dan ditandatangani oleh PPATS yang tidak lagi menjabat, maka akta tersebut sama halnya dengan akta biasa atau akta jual beli tersebut kehilangan otentikasi karena ditangani oleh pejabat yang tidak berwenang.

4) Delik Pemalsuan Dalam Arti Formil Dan Materil Merupakan Delik Tunggal

Mengenai objek yang dipalsukan dalam suatu surat tidaklah menjadi permasalahan apakah yang dipalsukan hanya satu kata atau satu kalimat atau satu fakta dan seterusnya yang tidak sesuai dengan kebenarannya atau tidak sesuai dengan faktanya. Semuanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan pemalsuan surat, baik memalsukan surat ataupun membuat surat palsu, baik dalam konteks pemalsuan dalam bentuk materiil maupun formil. Ini menjadikan pemalsuan surat merupakan delik tunggal yang cukup dilakukan satu kali untuk dapat terpenuhinya suatu delik.

5) Daluarsa Delik Pemalsuan Surat Dalam Arti Formil Dan Materil

Berangkat dari postulat *omnes actiones in mundo infra certa tempora habent limitationem*, yang bermakna setiap perkara ada batas waktu untuk diajukan tuntutannya²⁵, maka paling tidak ada 2 (dua) alasan sebagai dasar argumentasi adanya pranata hukum daluwarsa. *Pertama*, dari sudut hukum pidana materiil, sudah tidak ada lagi kebutuhan pemidaanaan dari masyarakat karena lampaunya waktu. Hal ini di dasarkan pada postulat *punire non necesse est* yang bermakna menghukum tidak selamanya perlu. Remmelink dengan mengutip pendapat Jescheck menyatakan bahwa lewatnya waktu barangkali pelaku kejahatan akan berubah menjadi baik. *Kedua*, dari sudut hukum pidana formil, dalam hal ini adalah masalah pembuktian. Kemampuan daya ingat manusia yang terbatas dan keadaan alam yang memungkinkan petunjuk alat bukti lenyap atau tidak mempunyai nilai pembuktian. Beberapa ahli berpendapat bahwa pranata hukum daluwarsa ini hanya terhadap kejahatan-kejahatan ringan, seperti yang berlaku di Inggris. Sedangkan terhadap kejahatan-kejahatan berat dan dalam menghadapi penjahat yang professional. Van Hamel berpendapat tidak perlu ada pranata hukum daluwarsa. Lamanya daluarsa tidak terlepas dari berat-ringannya perbuatan pidana. Semakin berat perbuatan pidana yang dilakukan, semakin lama tenggang waktu daluwarsa.²⁶

Berbicara daluarsa, maka tidak terlepas dari Pasal 78 dan Pasal 79 KUHP. Daluarsa lebih menekankan pada *tempus delicti* bukan *locus delicti*. Ada dua pemahaman mengenai daluarsa dalam Pasal 78 KUHP. Pertama, hitungan daluarsa dalam Pasal 78 KUHP tidak terlepas dari satu kualifikasi perbuatan pidana dan yang kedua yang paling inti, daluarsa itu tidak terlepas dari ancaman pidana maksimum dalam suatu pasal. Lalu kemudian dicantumkan dalam Pasal 78 KUHP untuk pelanggaran atau kejahatan dengan menggunakan barang cetak adalah 1 tahun, kemudian untuk pidana tidak lebih dari 3 tahun adalah 6 tahun, lalu lebih dari 3 tahun adalah 12 tahun, kemudian dalam arti seumur hidup adalah 18 tahun. Pasal 79 KUHP adalah perhitungan daluarsa. Pada dasarnya perhitungan daluarsa adalah sehari setelah perbuatan pidana dilakukan. Sehari setelah perbuatan pidana itu dilakukan, itupun harus dilihat jenis deliknya apa. Kalau jenis deliknya formil, maka sesudah unsur *flutoid* atau selesai, maka sehari setelahnya daluarsa dihitung. Sedangkan, apabila delik materil, maka sehari setelah akibatnya yang dihitung. Jadi misalnya, hari ini A menusuk B, A menghujam B dengan tusukan, B masuk ICU, satu bulan kemudian meninggal. Ini berarti daluarsanya bukan besok pagi, melainkan daluarsa dihitung setelah meninggal. Karena yang dilarang adalah akibat mati, sehingga daluarsa dihitung setelah akibat terjadi, berarti sebulan kemudian. Misalnya perbuatannya tanggal 12 Maret dan meninggal tanggal 12 April jadi perhitungan daluarsa terhitung mulai tanggal 13 April. Jadi setelah akibat itu terpenuhi.

Tetapi pada delik-delik formil, satu hari setelah perbuatan pidana selesai dilakukan, apabila semua unsur telah *flutoid* atau terpenuhi tanpa menimbulkan akibat. Sementara ketika berbicara mengenai Pasal 79 KUHP, memang untuk pemalsuan ada yang mengatakan bahwa terjadi sehari setelah surat itu digunakan, jadi bukan dibuat tetapi digunakan. Jadi, bisa saja pelaku membuat surat palsu, kemudian menyimpannya, dan selanjutnya dua atau tiga

²⁵ Pandora, Alodia. (2021). Analisis Pertimbangan Hakim Mengadili Delik Aduan Turut Serta Melakukan Zinah Yang Telah Kedaluwarsa (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 360/K/MIL/2017). *Verstek*, 9(1). 55-62.

²⁶ Hiariej, Edward Omar Sharif, *Op.Cit.*, hal. 16.

atau bulanan atau tahunan baru pelaku menggunakan. Ini sangat mungkin. Misalnya, pelaku membuat suatu testamen atau surat wasiat palsu yang dinyatakan oleh ahli waris tidak pernah membuat surat wasiat tersebut, sehingga menunggu pewaris meninggal, kemudian surat wasiat itu digunakan. Meninggalnya bisa terjadi puluhan tahun, sehingga ketika surat wasiat itu digunakan maka perhitungan daluarsa dimulai pada saat surat wasiat itu digunakan.

Dalam konteks Pasal 263, Pasal 264, Pasal 266 KUHP, atau secara umum, dalam pemalsuan surat baik dalam arti formil maupun materil, untuk penghitungan daluarsa memiliki 3 (tiga) kemungkinan yang harus diperhatikan, dibuktikan, dan dipastikan. Kemungkinan yang pertama, apakah terjadi resisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 KUHP tentang sengketa pra yudisial dimana terdapat sengketa perdata yang mengistirahatkan perkara pidana. Yang kedua, apakah ada tidak *sitting van verjaring* atau penghentian daluarsa. Ataupun yang ketiga, ada *voortgezettelijke handeling* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 KUHP mengenai perbuatan berlanjut.

Untuk kemungkinan yang pertama mengenai istilah istirahat daluarsa, misalnya dalam konteks tindak pidana pemalsuan yang memiliki masa daluarsa selama 12 (dua belas) tahun. Pemalsuan terjadi pada tahun 2010. Perkara mulai diproses pada tahun 2014. Ini berarti sudah 4 (empat) tahun sejak perbuatan pemalsuan dilakukan. Begitu perkara diproses tahun 2014 dimana ketika perkara pidana berjalan terdapat gugatan perdata, maka perkara pidana diistirahatkan, sesuai dengan konsep sengketa pra yudisial yang menyatakan daluarsa terhenti ketika ada sengketa pra yudisial yang terjadi karena ada perkara administrasi di pengadilan tata usaha negara atau perkara perdata sehingga perkara pidana dapat diistirahatkan. Dalam perkara perdata memiliki proses penyelesaian yang relatif lama sampai mempunyai kekuatan hukum tetap. Katakanlah penyelesaian perkara pidana selama 5 (lima) tahun, yakni dari tahun 2014 sampai tahun 2019. Selama perkara perdata berlangsung, maka daluarsa pidana terhenti. Jadi, berjalannya daluarsa dimulai dari tahun 2010 sampai tahun 2014, atau selama 4 (empat) tahun dan berhenti selama 5 tahun, yakni tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Begitu di tahun 2019, maka daluarsanya dihitung lagi. Jadi, dalam contoh kasus pertama, daluarsa terhenti pada tahun 2027, diambil dari tahun 2019 ditambah 8 (delapan) tahun, yakni 2027. Lalu 4 (empat) tahun sebelumnya, sehingga menjadi 12 (dua belas) tahun daluarsanya. Sehingga tidak benar apabila masa resten atau istirahat perkara pidana apabila terdapat sengketa pra yudisial dihitung sebagai daluarsa. Kemungkinan pertama ini hanya terjadi apabila terjadi resten atau istirahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 atau Pasal 81 KUHP.

Kemungkinan yang kedua berkaitan dengan *sitting van verjaring* atau penghentian daluarsa.²⁷ Misalnya, terjadi pemalsuan surat pada tahun 2010 dan baru diproses tahun 2020, sehingga sudah 10 (sepuluh) tahun sejak perbuatan pemalsuan surat dilakukan. Tetapi pada saat dipersidangan tahun 2020, terdakwa yang sedang diadili melarikan diri sehingga hakim tidak mungkin mengadili secara *in absentia*, maka pemeriksaan perkara harus dihentikan. Oleh karena pemeriksaan perkara dihentikan karena tersangka atau terdakwa melarikan diri, maka daluarsa akan berlangsung sampai dengan

²⁷ Kaligis, Indah Febriani. (2018). Daluarsa Penuntutan Pidana Ditinjau Dari Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Lex Crimen*, 7(1). 142-150.

tahun 2032, karena terjadi *sitting van verjaring* atau penghentian daluarsa karena tersangka atau terdakwa melarikan diri. Jadi, pada tahun 2020 perkaranya tidak dilanjutkan karena tersangka atau terdakwa melarikan diri. Daluarsanya bukan di tahun 2022 melainkan dihitung 12 (dua belas) tahun lagi, atau dihitung ulang.

Kemungkinan yang ketiga berkaitan dengan *voortgezettelijke handeling* atau perbuatan berlanjut.²⁸ Misalnya, terdapat suatu akta yang dibuat tahun 1970, akan tetapi digunakan berkali-kali sampai pada suatu pemeriksaan peninjauan kembali yang baru turun pada tahun 2010. Jadi, akta tersebut terakhir kali digunakan pada tahun 2010. Maka dalam *voortgezettelijke handeling* atau perbuatan berlanjut yang dihitung adalah saat terakhir surat palsu itu digunakan, yakni pada tahun 2010 untuk pengadilan peninjauan kembali. Jadi, sesuai dengan teori adanya daluarsa digabungkan dengan *voortgezettelijke handeling*, maka daluarsa baru timbul nanti pada tahun 2022, karena surat itu terakhir digunakan pada tahun 2010.

Berbicara mengenai *verjaring* atau daluarsa dalam tindak pidana pemalsuan surat memang rumit. Tidak hanya melihat pada pasalnya secara kaku bahwa kemudian penghitungan daluarsa dapat dihitung. Melainkan harus dilihat apakah terdapat kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi sebelumnya. Apakah dalam kategori adanya sengketa pra yudisial, *sitting van verjaring* atau *voortgezettelijke handeling*. Kalau itu perbuatan berlanjut, maka harus dilihat kapan surat palsu tersebut terakhir digunakan. Surat merupakan *corpus delicti* atau barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Meskipun surat itu digunakan oleh seseorang kemudian orang lainnya lagi atau baik itu a, b, c, d, e, f, tidak menjadi persoalan. Melainkan harus dilihat, kapan surat sebagai *corpus delicti* digunakan. Jadi, daluarsa dalam tindak pidana pemalsuan surat tidak mempersoalkan subjek hukum siapa yang menggunakan, tetapi kapankah *corpus delicti* atau barang hasil kejahatan itu terakhir kali digunakan. Meskipun orang itu berbeda tetapi dalam jangka waktu tertentu itu berulang-ulang, maka tetap dihitung pada kapankah terakhir kali *corpus delicti* atau barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Terlepas dari orang pertama yang menggunakan berbeda, jadi katakanlah surat itu digunakan dalam beberapa tahun oleh orang yang berbeda-beda, itu tidak menjadi persoalan. Jadi dilihat terakhir kali kapan surat tersebut digunakan bukan pada subjek hukumnya.

PENUTUP

Delik pemalsuan surat dalam Pasal 263 ayat (1) KUH.Pidana sebagai delik tunggal mengandung 2 (dua) makna, yakni membuat palsu atau memalsukan surat dalam arti formil dan materil. Keduanya merupakan bentuk perluasan makna perbuatan pemalsuan surat. Dalam arti materil bermakna isi dalam surat tersebut mengandung ketidakbenaran atau tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, sedangkan dalam arti formil mencakup unsur-unsur formil yang dipalsukan, seperti tandatangan yang dipalsu, serta orang yang seharusnya tidak bertandatangan namun bertandatangan dalam suatu surat. Konsekuensi dari membuat atau memalsukan surat dalam arti formil dan materil mengakibatkan surat tersebut menjadi tidak sah. Apabila dilakukan pemalsuan surat dalam arti formil terhadap akta otentik, maka otentikasi akta

²⁸ Kartika, Tantri. (2018). Politik Hukum Pembentukan Delik Perbuatan Jahat Dalam Tindak Pidana Korupsi. *The Juris*, 2(2), 132-140.

tersebut akan hilang sehingga menjadi akta biasa, karena dibuat oleh seseorang yang berwenang. Selain itu, terkait penghitungan daluarsa baik dalam konteks pemalsuan surat secara materil maupun formil, harus memperhatikan adanya sengketa pra yudisial, *sitting van verjaring* atau *voortgezettelijke handeling*.

Berdasarkan penjelasan bentuk pemalsuan surat dalam arti formil dan materil beserta akibat hukumnya tersebut, maka diharapkan memberikan pemahaman bagi penegak hukum sehingga tidak keliru dalam menerapkan delik pemalsuan surat terhadap peristiwa hukum konkrit.

DAFTAR RUJUKAN

A. Jurnal

- Aryana, I Wayan Putu Sucana. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Keterangan Negatif Covid-19." *Jurnal Yustitia* 14, No. 1 (2020): 34–40. tersedia di <https://mail.djinggamedia.com/index.php/yustitia/article/view/486>, (diakses, 1 Agustus, 2021).
- Assa, Efrita Amalia. "Tindak Pidana Pemalsuan Uang Oleh Korporasi Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang." *Lex Crimen* 10, No. 3 (April 1, 2021): 16–25. tersedia di <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/33116>, (diakses, 1 Agustus, 2021).
- Hendra, Rahmad. "Tanggungiawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempgunakan Identitas Palsu Di Kota Pekanbaru." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (March 8, 2013). DOI : <https://doi.org/10.30652/JIH.V3I01.1029>.
- Kaligis, Geovan Valentino. "Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Pasal 263 KUHP." *Lex Privatum* 9, No. 4 (April 6, 2021): 175–82. tersedia di <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33357>, (diakses, 1 Agustus, 2021).
- Kaligis, Indah Febriari. "Daluwarsa Penuntutan Pidana Ditinjau Dari Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)." *Lex Crimen* 7, No. 1 (April 26, 2018): 142–50. tersedia di <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/19425>, (diakses, 1 Agustus, 2021).
- Kartika, Tantri. "Politik Hukum Pembentukan Delik Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Korupsi." *The Juris* 2, No. 2 (December 28, 2018): 132–40. tersedia di <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/view/41>, (diakses, 1 Agustus, 2021).
- Lamatenggo, Christellia G. N., Harly S. Muaja, and Deizen D. Rompas. "Kajian Yuridis Pemalsuan Surat Sederhana (Pasal 263 KUHP) Dalam Kaitannya Dengan Pemalsuan Akta Otentik (Pasal 264 Ayat (1) Ke 1 KUHP)." *Lex Crimen* 10, No. 1 (January 12, 2021): 70–78. tersedia di <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/32029>, (diakses, 1 Agustus, 2021).
- Lidya Gultom, Syafrudin Kalo, Mahmud Mulyadi, M. Ekaputra. "Criminal Liability Against Children As Offenders Of Narcotics Abuse Based On The Decision Of The Tebing Tinggi District Court No. 21/Pid.Sus-Anak/2018/PN.TBT." *Res Nullius Law Journal* 3, No. 1 (January 31, 2021):

- 55–78. DOI : <https://doi.org/10.34010/RNLJ.V3I1.3709>.
- Pandora, Alodia. "Analisis Pertimbangan Hakim Mengadili Delik Aduan Turut Serta Melakukan Zinah Yang Telah Kedaluwarsa (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 360/K/MIL/2017)." *Jurnal Verstek Universitas Sebelas Maret*, 2021. tersedia di <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/49929>, (diakses, 1 Agustus, 2021).
- Putranto, U. (2019). KEWAJIBAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH ADVOKAT DALAM KEDUDUKANNYA SEBAGAI OFFICIUM NOBILE. *PLENO JURE*, 8(1), 39-47.
- Rahim, Muhammad Ibnu Fajar, Sitti Arkanul Pascahyati Rahim, Muhammad Aman Hijrah Akbar Rahim, Ahmad Ranuwirawan Rahim, and Abdul Rahim. "Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Pada Tingkat Pemeriksaan Persidangan." *Pleno Jure* 9, No. 1 (2020): 47–57. DOI : <https://doi.org/10.37541/plenojure.v9i1.389>.
- Rays, Moh. Ikhwan. "Tinjauan Hukum Delik Pembunuhan, Delik Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dan Delik Kealpaan Menyebabkan Kematian." *Jurnal Yustisiabel* 1, No. 1 (April 20, 2017): 83–99. DOI : <https://doi.org/10.32529/YUSTISIABEL.V1I1.406>.
- Susanto, Eko Adi, dan Gunarto Gunarto. "Pertanggungjawaban Pidana yang Memakai Surat Palsu Ditinjau dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP." *Jurnal Daulat Hukum* 1, No. 1 (March 15, 2018): 1–12. DOI : <https://doi.org/10.30659/JDH.V1I1.2558>.
- Yusuf, M. A., & Fidyansari, D. (2019). Interpretation of Judges in Supreme Court Decision Number: 46 P/HUM/2018. *Substantive Justice International Journal of Law*, 2(2), 147-160.
- Zulfa, Eva Achjani. "Menghancurkan Kepalsuan (Studi Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Dan Problema Penerapannya)." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, No. 2 (September 7, 2018): 345–60. DOI : <https://doi.org/10.21143/JHP.VOL48.NO2.1667>.

B. Buku

- Chazawi, Adami, and Ardi Ferdian. *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan Dan Berita Yang Disampaikan*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2014. tersedia di https://books.google.co.id/books/about/Tindak_pidana_pemalsuan.html?id=MncZrgEACAAJ&redir_esc=y. (diakses, 1 Agustus, 2021).
- Hamzah, Prof. Dr. Jur. Andi. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*. Jakarta : Sinar Grafika, 2015. tersedia di <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=934252>, (diakses, 1 Agustus, 2021).
- Hiariej, Eddy O S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- P.A.F. Lamintang. *Delik-Delik Khusus : Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, Dan Peradilan*. Jakarta : Sinar Grafika, 2009. tersedia di https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show_detail&id=14496&keywords=, (diakses, 1 Agustus, 2021).

C. Peraturan

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-036/A/JA/09/2011
Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara
Tindak Pidana Umum.

Petunjuk Teknis Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria Pemanfaatan
Ruang dan Tanah Nomor : 01/JUKNIS/D.VII/2018 tanggal 10 April
2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanggal 28 Agustus 2019.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris.